



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN
DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DAN DIRJEN PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 5 September 2023
Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d. 16.25 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI
Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-P. NASDEM) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Acara : Membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing Unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2024 (melanjutkan rapat tanggal 4 September 2023)
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
32 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
7 dari 12 orang Anggota
1. Hj. Sadarestuwati, S.P., M.MA.
2. Ir. Sudjadi
3. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
4. Sri Rahayu
5. Ir. Effendi Sianipar
6. Harvey B. Malaihollo
7. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., MCOMN&MEDIAS
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
4 dari 8 orang Anggota
1. Drs. Hamka B Kady, M.S.
2. Cen Sui Lan
3. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.
4. Muhammad Fauzi, S.E.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
3 dari 7 orang Anggota
 1. Ir. Sumail Abdullah
 2. Sudewo, S.T., M.T.
 3. Ir. Eddy Santana Putra, M.T.

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Roberth Rouw
 2. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 3. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA (F-PKB)
4 dari 6 orang Anggota
 1. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.
 2. H. Irmawan, S.Sos., M.M.
 3. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 4. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 5. H. Syafiuddin, S.Sos.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
3 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Irwan S.IP., M.P.
 2. Willem Wandik
 3. Drs. H. Anwar Hafid, M.Si.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA (F-PKS)
2 dari 5 orang Anggota
 1. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.
 2. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
(F-PAN)
3 dari 4 orang Anggota
 1. H. Boyman Harun, S.H.
 2. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
 3. Mesakh Mirin, SKM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Dr. Capt. Antoni Arif Pribadi, M.Sc.),
2. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI (Ir. Mohamad Risal Wasal, ATD., MM., IPM).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-P. NASDEM (ROBERTH ROUW)/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Dirjen Perkeretaapian dan Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, hari Selasa tanggal 05 September pukul 15.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Perkeretaapian dan pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Seluruh Indonesia dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat.

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi V DPR RI, saat ini Rapat Komisi V DPR RI telah diikuti oleh 20 orang dari 55 Anggota yang terdiri dari 9 fraksi sehingga telah memenuhi kuorum. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281, Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah kami membuka rapat dengar pendapat pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), rapat hari ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB)

Terima kasih kepada Dirjen Perkeretaapian dan Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan

kami pada rapat dengar pendapat hari ini menghadirkan juga para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Seluruh Indonesia dan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian dengan agenda membahas alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

**Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Para Dirjen Kementerian Perhubungan, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Sebagaimana hasil laporan singkat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 kemarin dan telah disepakati dua hal, antara lain:

1. Komisi V DPR RI bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sepakat untuk menjadwalkan kembali rapat dengar pendapat terkait alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon 1 dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 pada Selasa 5 September.
2. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk menyempurnakan alokasi anggaran dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan usulan, saran, dan pendapat Komisi V DPR RI.

Selanjutnya, bahwa RDP hari ini melanjutkan RDP kemarin yang tertunda. Sejalan dengan itu, dalam kesempatan ini kami tegaskan kembali agar dalam proses penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 agar tiap-tiap unit organisasi Eselon I Kementerian Perhubungan benar-benar dapat memperhatikan dan mengakomodir saran dan masukan dari Komisi V DPR RI.

Demikian pengantar dari kami. Untuk mempersingkat waktu kepada Dirjen Perkeretaapian dan Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan penjelasan sesuai dengan agenda rapat pada hari ini yang telah disepakati kemarin. Untuk itu, kami beri kesempatan kepada kereta api. Singkat saja, Pak, kemarin kan sudah.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Baik.

Yang kami hormati Pimpinan Ketua Komisi V, Wakil Ketua Komisi V, dan segenap Anggota Komisi V, serta Pak Dirjen Perhungan Laut,

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Terima kasih atas waktunya pada kesempatan yang baik ini. Menindaklanjuti hasil rapat kemarin dengar pendapat, pada Senin 4 September, kami telah menindaklanjuti dengan makan bersama berdua dengan Dirjen Perhubungan Laut menghadap Pak Menteri Perhubungan dan kami sudah mendapat arahan bagaimana untuk menyikapi apa yang menjadi masukan dari Anggota, Pimpinan Komisi V yang kami hormati untuk bisa menindaklanjuti apa yang menjadi saran, masukan dari Bapak-Ibu sekalian.

Pada prinsipnya, sesungguhnya apa yang telah kami susun itu adalah sudah memasuki, sudah mengakomodir atau menindaklanjuti apa yang menjadi masukan Bapak-Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Pada paparan yang kami sampaikan hari ini juga, kami sudah lampirkan, Pak, apa yang menjadi saran masukan Bapak-Ibu dan mana yang sudah kami tindaklanjuti di dalam proyek-proyek ini. Namun, mungkin ada beberapa hal yang belum kita *lanjuti*, mungkin nanti pada rapat hari ini bisa kita sepakati, Pak, adanya masukan terakhir dari sisi Komisi V yang akan kami usulkan dalam di kegiatan kami di tahun 2024.

Prinsipnya itu, Pak Ketua. Namun, izinkan saya sedikit melakukan dari untuk kereta api dan kereta api Pak *gitu loh*. Dari semua usulan Anggota Komisi V, ada beberapa memang yang belum kami masuki yaitu terkait dengan kegiatan reaktivasi jalur kereta api di Jawa dan di Sumatera. Hal ini terkait dengan terbatasnya PPN anggaran APBN serta prioritas kami yang belum ke arah reaktivasi untuk jalur-jalur yang secara signifikan datanya belum menunjukkan untuk bisa direaktivasi. Namun, bukan berarti itu tidak kami laksanakan, namun itu akan kami usulkan dalam proyek bentukan KPBU, Pak, dari Kerjasama Pemerintah Badan Usaha. Selanjutnya, di dalam anggaran (*suara kurang jelas*) juga akan kami selesaikan di tahun 2024.

Ada satu kegiatan di Aceh, Pak, kelanjutan pembangunan Kuta Blang dan Matang Glumpang II ini juga, Pak, belum kita, belum bisa kami masukkan. Prosesnya adalah susun DED pembangunan jalur kereta api Kuta Blang-Matang Glumpang II pada tahun 2022 dengan hasil kerja membutuhkan anggaran pembangunan sebesar 485 miliar dengan skema kontrak tahun jamak. Namun, karena kami untuk 7,4 kilometer tersebut, namun karena arahan kami untuk tidak melebihi tahun fiskal, kami mohon maaf, Pak, untuk yang *multiyears* tidak bisa kami selesaikan di tahun 2024 ini. Itu yang bisa kami lakukan, Bapak, untuk Ditjen Perkeretaapian.

Selebihnya semua kegiatan sudah kami sampaikan, sudah kami paparkan apa yang menjadi masukan atau arahan dari Bapak-Ibu Pimpinan sebagai aspirasi sudah kami masukan dalam kegiatan kami di tahun 2024.

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Namun, masih ada terbuka slot untuk kalau ada Anggota yang masih program masih belum ini bisa diusulkan ya.

DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM):

Bisa, Pak.

KETUA RAPAT:

Sinkronasi ya.

Baik.

Lanjut Pak Dirjen Perhubungan Laut sedikit saja mungkin pernyataan.

Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI (Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIBADI, M.Sc.):

Baik.

Terima kasih, Ketua.

Yang kami hormati Ketua, Anggota yang kami muliakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tentunya kami mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mengulang kembali apa yang menjadi program kami di tahun 2024. Kami telah mempelajari beberapa masukan dari para Anggota Komisi V dan kami kemudian mencoba menyesuaikan apa-apa yang sudah dianggarkan di 2024. Pada intinya, memang diperlukan sinkronisasi antara apa yang telah kami programkan dengan apa yang telah menjadi masukan dari Komisi V.

Demikian, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Dari Anggota mungkin ada tanggapan. Saya beri kesempatan dari sayap kiri, Pak Sumail silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. SUMAIL ABDULLAH):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,
Bapak Dirjen Kereta Api, Dirjen Perhubungan Laut, dan segenap jajaran,**

Nah, kaitannya dengan anggaran yang saya coba cermati dari kedua direktorat ini bahwa ada peningkatan ada sekitar yang 70 miliar mungkin di apa namanya di Perhubungan Laut terus kemudian 2 kurang lebih 2 triliun di DJKA. Tentu kenaikan anggaran ini diharapkan mampu memberikan layanan yang baik terhadap masyarakat. Dan beberapa waktu lalu saya ingin coba ingatkan bahwa utamanya kepada Direktorat Jenderal Laut.

Kami, tiga tahun yang lalu pernah datang reses komisi di sana, Pak, meninjau dengan dengan pemerintah daerah, Pelabuhan Kalbut, dan hingga sekarang masih belum ada tanda-tanda untuk dibangun. Padahal posisi pelabuhan itu sangat strategis dalam rangka untuk pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya bahkan ke beberapa daerah. Kita pahami bahwa di Situbondo itu tepatnya di Situbondo, Pak. Ada banyak kapal-kapal besar, kapal-kapal asing kaitanya dengan apa namanya kapal-kapal Migas yang dari luar negeri juga sandarnya itu jauh di lepas pantai dan apabila ini merapat tentu akan berdampak secara ekonomi.

Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kenapa ini harus dibangun, Pak. Tentu pertama dari kesetaraan agar APBN-APBN itu bisa juga dirasakan oleh masyarakat-masyarakat di mana Dapil kami berada, seperti itu. Dan ini senantiasa ditanyakan kapan, Pak, ini Pak, dibangun? kapan dibangun, Pak? bupatinya juga sudah pernah datang kepada Dirjen yang lama tempo hari sudah pergantian dua atau tiga Dirjen, Pak, seperti itu. *Nah*, ini menjadi tugas konstitusi kami untuk kita amplifikasi pada kesempatan forum rapat yang berbahagia ini agar kiranya di tahun 2024 segera bisa dibangun.

Yang kedua, ada juga di situ perlu revitalisasi terhadap pelabuhan Panarukan. Berkali-kali kami juga sampaikan, terkadang kami juga malu, Pak, apa artinya rapat di sini kalau kemudian tidak ada rencana-rencana kegiatan yang tegas, terus kemudian berdampak ya. Dan sayang sekali di Pelabuhan Panarukan itu sudah pernah kita itu (*suara kurang jelas*) kurang lebih 45 miliar di 2005 kalau tidak salah, Pak, hari ini tidak terpakai tidak dioperasikan karena ada beberapa konstruksi yang sudah rusak. Dan juga di sana Panarukan merupakan kalau kita lihat bahwa atau kita pernah mendengar dulu pernah ada jalan dari Panarukan ke Anyer, *nah*, tentu itu adalah pelabuhan yang punya juga nilai *history*.

Kaitannya dengan DJKA, Pak Dirjen. Saya cuman juga ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam pembahasan anggaran ini paling tidak juga kenapa kami bercerita tentang Dapil, karena ini wujud daripada atau implementasi daripada Undang-Undang MD3 di mana kami wajib, Pak, hukumnya, Pak, ya sekali lagi wajib. Kami ini punya tanggung jawab moral, Pak, kami punya tanggung jawab secara politik, kami dipilih oleh masyarakat sana, tentu kami harus mengaspirasikan apa-apa yang menjadi kepentingan mendesak ya. Ada 2 triliun kurang lebih yang Bapak dapatkan hari ini tambahannya, dan kurang lebih juga 2.000 perlintasan kereta api yang ada di seluruh Indonesia. Tapi hari ini sampai hari ini penanganannya juga tidak terlalu signifikan.

Tiga minggu yang lalu di Banyuwangi tepatnya di perlintasan Klatak, Pak, ada kejadian mobil disambar oleh kereta api karena di situ tidak ada palang pintunya, diharapkan kereta api mampu mendukung konektivitas dan meningkatkan konektivitas antar daerah. Nyatanya hari ini, perkeretaapian itu justru menjadi mesin pembunuh, sementara keselamatan warga adalah hukum tertinggi di negara kita.

Saya kira itu catatan-catatan pentingnya, Pak Ketua dan Pak Dirjen. Mohon maaf pun saya agak tinggi, saya hanya ingin penegasan saja bahwa ada beberapa kegiatan-kegiatan yang di Dapil perlu diakomodir karena itu untuk kepentingan warga. Satu hal lagi, Pak, titipan Bupati Bondowoso, kiranya ada stasiun di situ, ada kereta api yang di Bondowoso bisa digunakan untuk jadi kereta api wisata.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Baik.

Pak Irwan, silakan

F-P. DEMOKRAT (Dr. H. IRWAN, S.IP., M.P.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian, Direktur, dan Seluruh jajaran Kementerian Perhubungan yang hadir pada rapat hari ini,

Saya menyampaikan terima kasih ya di tengah ada tekanan direktif Presiden terkait anggaran ke IKN tetapi beberapa rehab fasilitas pelabuhan di Kaltim masih menjadi prioritas Ditjen Perhubungan Laut dan tentu ini selaras semangatnya untuk terus menaikkan optimalisasi PNBK Kemenhub dari sektor Perhubungan Laut. Dan kemarin Komisi V reses di Kota Bontang, saya mengingatkan, Pak Dirjen, itu ada Pelabuhan KSOP di sana dermaganya masih kayu, ada dermaga yang beton tetapi masih ada yang sambungannya kayu. Saya pikir itu bisa *dituntasin* karena KSOP Bontang ini kan termasuk salah satu KSOP juga yang cukup menyumbangkan PNBK pada Kemenhub. *Nah*, itu dermaganya bisa untuk dermaga umum, logistik, juga untuk dermaga pariwisata. Jadi, kalau bangun dermaga pariwisata IKN itu sebenarnya belum prioritas *sih* kalau menurut saya, tapi saya pikir semangat Pak Presiden tentu untuk fungsional IKN tahun depan mungkin itu juga menjadi prioritas.

Kemudian saya juga terima kasih karena tahun ini sudah tender ya di Muara Manggar itu rencana untuk pemasangan pembangunan rambu suar navigasi karena ada pendangkalan dan sudah ada korban jiwa manusia. Saya mewakili masyarakat Manggar Balikpapan berterima kasih.

Untuk kereta api karena saya lihat ada rencana besar ya terkait IKN untuk kereta api dari Balikpapan ke IKN KIPP termasuk juga dari Balikpapan ke Samarinda. Untuk transportasi publik mudah-mudahan kajiannya terus bisa tuntas dan di 2024-2025 nanti bisa untuk apa namanya pembangunan fisiknya.

Mungkin itu *aja* Pimpinan

Terima kasih banyak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Pak Irwan.

Langsung Bu Irine, Irine Yusiana. Silakan, Bu Irine.

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MCOMN&MEDIASST):

Oke.

Terima kasih, Pimpinan, atas kesempatan yang diberikan.

Yang saya hormati Bapak Dirjen,

Langsung saja, Pak, kepada Pak Dirjen Hubungan Laut. Pertama saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya, apresiasi saya sebesar-besarnya terhadap berbagai pencapaian dan juga kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dari dukungan kapal perintis di berbagai provinsi, tol laut, juga pembangunan dan revitalisasi pelabuhan laut hingga sarana navigasi pelayaran. Ini apresiasi juga saya sampaikan karena banyaknya anggaran yang juga dialokasikan untuk Maluku Utara daerah pemilihan yang saya wakili, ini ada banyak sekali titik di sana terutama untuk fasilitas pelabuhan dan juga terminal penumpang.

Dan jika saya melihat pemaparan Pak Dirjen ini yang kemarin sebenarnya ini terkait Renstra Dirjen Perhubungan Laut dari 6 poin yang Bapak paparkan kemarin, itu saya melihat ada 3 poin pertama yang sangat relevan dengan kebutuhan di Dapil saya, Pak. Ini yang saya pikir Maluku Utara adalah provinsi yang sangat terhubung oleh laut, kita ada 1.400 pulau dan konektivitas itu menjadi tantangan yang masih kami hadapi gitu. *Nah*, poin tiga poin itu yaitu adalah angkutan laut yang mudah, peningkatan konektivitas transportasi laut, dan juga infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing merupakan sesuatu yang sudah lama kami nantikan dan ini kami sadari kalau tidak ada bantuan dari pusat, kami di daerah tidak bisa mengupayakannya sendiri, Pak.

Oleh karena itu, saya mohon di Tahun Anggaran 2024 karena memang sifatnya mungkin masih bisa dimasukkan sebagai pertimbangan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, Pak, mewakili kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Yang pertama, Pak, untuk Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Barat ini permohonan ini sudah beberapa kali saya sampaikan di RDP yang lalu, Pak, yaitu permohonan mengenai alat bongkar muat untuk mendukung program tol laut. Jadi di Pelabuhan Jailolo Halmahera Barat itu, Pak, kami sangat membutuhkan alat bongkar ini karena memang kebutuhannya itu adalah berupa *forklift* kapasitas 28 ton. Karena kalau tidak, Pak, ini akan menghambat perputaran barang yang ada di Halmahera Barat. Jadi Jailolo sebagai Ibu kota kabupaten pelabuhannya membutuhkan itu dan ini sudah beberapa kali saya sampaikan di rapat-rapat RDP.

Lalu yang kedua, Pak, Ini juga beberapa kali saya sampaikan dan kemarin juga sudah saya sampaikan ketika Raker dengan Pak Menteri yaitu adanya rute trayek kapal penyeberangan yang melintas dari Bitung ke Tobelo. Kami mohon supaya trayek tersebut itu juga singgah di Pelabuhan Kedi, Loloda

karena seperti yang saya sampaikan kepada Pak Menteri pada Raker yang lalu karena kalau ini trayeknya berjalan, saya yakin bahwa akan menghasilkan multi efek ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat di Loloda. Jadi mohon, Pak, untuk perhatiannya sehingga distribusi di Loloda itu juga bisa baik berjalan dengan baik seperti di daerah-daerah lain.

Lalu selanjutnya, Pak, masih dari Halmahera Barat. Ini juga ada kebutuhan penambahan satu trayek kapal perintis dengan pangkalan Jailolo. Jadi sampai saat ini Pangkalan Perintis hanya ada di Ternate. Jadi sebagai gambarnya, Pak, Jailolo Ternate itu kalau *enggak* ombak nyebrang dengan *speed boat* itu 45 menit, kalau ada ombak bisa 1,5 jam sampai 2 jam, Pak. Jadi saya mohon ada tambahan trayek kapal perintis, pangkalannya Jailolo untuk rute Jailolo-Bataka-Kedi-Mayo-Bitung pulang pergi. Ini karena supaya kita ke Bitung pengiriman barang dan juga apa untuk penumpang itu bisa terlayani, Pak.

Lalu juga yang terakhir dari Halmahera Barat, ini adanya penambahan trayek feri Tobelo-Morotai, Pak. Ini mungkin sudah ke-3 kalinya saya sampaikan, Pak, di dalam rapat RDP, ini karena memang masyarakat hari ini sangat membutuhkan penambahan ini, Pak. Jadi saat ini baru sehari sekali yaitu pagi ke Morotai lalu balik lagi ke ke Tobelo. Harapannya, Pak, pagi ke Morotai sore ke Tobelo ini bisa mendukung bolak-balik gitu. Jadi itu 2 jam, Pak, itu tempuh waktu tempuhnya.

Lalu yang kedua, Pak, untuk kabupaten lain yaitu Kabupaten Kepulauan Morotai. Saya terima kasih karena sudah banyak dianggarkan ini terutama untuk sisi laut Pelabuhan Daruba untuk penambahan dermaga ini sudah masuk di dalam pagu 2024 seperti yang Bapak paparkan, terima kasih atas dukungannya. Saya hanya ingin menekankan permohonan saya untuk pengawalannya karena Morotai melupakan kawasan ekonomi khusus dan ini saya juga kemarin ketika reses, saya juga langsung terjun dan sudah saya sampaikan juga kepada Pak Menteri dalam Raker minggu lalu bahwa di dalam temuan masa reses saya, itu ada kebutuhan akses feri yang tadi juga saya sampaikan antara Morotai dan Tobelo ini untuk menggerakkan ekonomi rakyat.

Lalu yang selanjutnya, Pak, untuk Kabupaten Halmahera Utara. Saat ini ini juga ada kebutuhan yang sangat mendesak yaitu berupa pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pediwang. Jadi di Halmahera Utara di penyeberangan Pediwang karena Pelabuhan Dorokao saat ini kondisinya rusak berat, Pak, rusak berat itu karena hantaman ombak yang berulang-ulang kali. Jadi kalau umpamanya itu diperbaiki di titik yang sama saya pikir hasilnya juga nanti hasil akhirnya akan sama, Pak. Jadi usulan kami ada pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pediwang yaitu yang saya pikir kondisinya memenuhi syarat keamanan untuk keselamatan penumpang karena posisinya juga sangat strategis untuk konektivitas antara Halmahera Utara dan juga

Halmahera Timur. Jadi mohon dukungan untuk ini, Pak, karena ini sangat *urgent* sekali menurut hemat saya.

Dan yang terakhir untuk Kota Ternate yang kita tahu bahwa Ternate menjadi kota yang paling sibuk yang paling ramai di Maluku Utara dan kami memiliki Pelabuhan Ahmad Yani di Ternate. *Nah*, kemarin saat bulan April, Pak, ini mudik itu mengalami *overload*, kapasitasnya hanya 1.000 tetapi bisa diperkirakan ketika Nataru dan mudik lebaran itu mencapai 2.000 orang, jadi dua kali lipatnya, *Pak*. *Nah*, pelabuhan sandar dermaganya yang menghubungkan Ternate dengan banyak wilayah di Kabupaten di Maluku Utara ini menjadikan Pelabuhan Ahmad Yani ini juga pelabuhan yang sangat strategis. Saya mohon itu beberapa kebutuhan revitalisasi untuk Pelabuhan Ahmad Yani, Pak, bisa tertangani karena saat ini yang membuat Pelabuhan Ahmad Yani sangat *crowded* itu karena pelabuhannya penumpang dan juga barang itu jadi satu, Pak, Jadi ada kebutuhan untuk revitalisasi ini supaya memisahkan kebutuhan itu.

Jadi itu saja mungkin, Pak Dirjen, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon pengawalannya untuk Maluku Utara. Terima kasih Pimpinan atas kesempatannya.

KETUA RAPAT:

Baik, Bu Irine selesai.

Muhammad Fauzi, silakan Pak.

F-P. GOLKAR (MUHAMMAD FAUZI, S.E.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang saya hormati Bapak Ketua,
Pak Dirjen dan teman-teman Perhubungan kemudian juga teman-teman
Komisi V,**

Sedikit saja saya, ada beberapa hal, Pak, yang ingin sampaikan yang pertama untuk Dirjen Perkeretaapian. Kalau tidak salah, Pak, saya mendengar ada kenaikan, Pak, tiket kereta api, Pak. Itu kalau tidak salah hampir 200 ribuan itu, Pak. *Nah*, ini apa ya, kira-kira apa yang menjadi *reasoning*-nya atau alasan yang kuat gitu, Pak, ya sehingga ada kenaikan. Apakah memang ada hal-hal yang juga ada dampaknya dirasakan oleh para penumpang, Pak? Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau tidak salah ada beberapa minggu yang lalu saya pun sempat ditelepon dari detik com, Pak, ya mengenai apa kereta Jakarta yang baru di itu, Pak, katanya pintunya terlalu tidak, apabila ada masyarakat pengguna transportasi tersebut yang tingginya melebihi rata-rata *enggak* bisa masuk itu, Pak. *Nah*, ini saya diwawancarai, saya sampaikan mudah-mudahan dalam waktu dekat bukan mengganti kereta api tapi memperbaiki, kalau mengganti kereta api kan *ndak* mungkin gitu, Pak. *Nah*, karena itu saya ingin dapat info juga dari Bapak, apa langkah yang akan diambil dalam memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Yang ketiga, saya kembali, Pak, ingin mengingatkan kepada Bapak. Dambaan kami, Pak, Sulawesi Selatan, kereta api itu menjadi satu hal yang apa baru setengah mimpi, Pak, mimpinya belum sempurna, Pak. *Nah*, karena itu saya titip, Pak, walaupun saya baca kemarin masuk, Pak, ya kelanjutan Parepare-Makassar ya. Mudah-mudahan, saya *nggak* tahu apakah tuntas itu, Pak, tahun 2024. Kalau tuntas *alhamdulillah*, kalau tidak tolong, Pak, di apa dilanjutkan, Pak, sehingga mimpi itu apa menjadi sebuah harapan dan menambah alat transportasi yang ada di Sulawesi Selatan.

Kemudian untuk laut, ya intinya kalau saya *sih*, Pak, mari kita sama-sama bekerja sesuai dengan Poksi kita, Poksi kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling membesarkan tanpa harus melanggar undang-undang yang ada, Pak. Saya pikir itu.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Dari anggota? selesai ya. Oh Pak Hafid, silakan.

F-P. DEMOKRAT (Drs. H. ANWAR HAFID, M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Salam sejahtera buat kita sekalian.

**Bapak-Bapak para Pimpinan, para sahabat Komisi V,
Pak Dirjen dan seluruh jajarannya,**

Saya hanya ingin menyampaikan, Pak Dirjen, karena saya lihat sesuai dengan apa yang dipaparkan. Ada satu hal yang sering saya sampaikan setiap kita RDP, Pak Dirjen, soal Pelabuhan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan itu di Sulawesi Tengah itu ada dua kabupaten di Kepulauan namanya Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Salah satu akses yang paling ramai itu adalah melalui Banggai Laut-Banggai Kepulauan. Semua yang mau ke daerah pulau itu lewat Banggai Kepulauan di Salakan, itu paling ramai, Pak, paling ramai di situ transportasi lautnya. Sayangnya fasilitas pelabuhan di situ kurang memadai sehingga diharapkan ke depan ini menjadi salah satu prioritas dari kementerian untuk mendapatkan penanganan sehingga pelayanan masyarakat akan lebih maksimal dan juga jalur tol laut itu akan bisa mengakses dua kabupaten itu.

Nah, oleh karena itu, sekali lagi mungkin, Pak, saya ingin menyampaikan ini, Pak Bupati juga sudah sangat intens berkomunikasi dengan kementerian, Pak. Jadi beliau menitipkan tadi ini beliau titip khusus langsung semua usulan yang sudah masuk di kementerian dan saya *InsyAllah* mendukung sepenuhnya usulan Pak Bupati ini untuk dimasukkan sebagai salah satu bagian prioritas untuk kegiatan 2024. Saya kira itu, Pak Dirjen.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bu Irine ada?

F-PDIP (IRINE YUSIANA ROBA PUTRI, S.Sos., MCOMN&MEDIASST):

Ada, boleh sebentar saja.

KETUA RAPAT:

Oh, boleh silakan-silakan.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Sedikit saja.

KETUA RAPAT:

Tunggu ini saya serahkan dulu ya.

Pak Boyman, silakan.

F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Ketua.

Langsung saja Ke Dirjen Laut. Pak Dirjen, di daerah saya itu di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, itu pelabuhannya itu sudah bertaraf nasional bahkan internasional. Dulu sebagai alternatif agar masyarakat itu bisa berangkat ke Semarang itu ada kapal, Pak, dulunya, Pak, ada Kapal Cisadane namanya. Artinya kalau kita berangkat jam 7 malam itu jam 5 pagi kita sudah sampai di Semarang. Dan pergerakan ekonomi pada waktu itu sangat baik sekali antara Kabupaten Ketapang Kecamatan Kendawangan dan Semarang itu rutenya sangat baik, artinya orang bisa pergi ke Semarang dengan pulang membawa barang-barang yang untuk dijual di Kalimantan Barat. Cuman sekarang, Pak, kapal itu sudah tidak ada. Harapan saya ke depan, Pak, dengan pelabuhan sudah baik itu, sudah dibangun oleh kementerian bahkan sekarang juga masih dikerjakan agar pemanfaatannya tidak saja untuk tambat labuh kapal tetapi juga untuk penyegaran ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat agar kapal penyeberangan feri dari Semarang ke Kendawangan itu dihidupkan kembali, Pak, karena manfaatnya sangat luar biasa dan penumpangnya itu ramai sekali, Pak. Karena di Kendawangan itu kan ada perusahaan besar, Pak, Alumina Bauksit WHW itu, jadi tenaga kerjanya itu banyak juga dari Jawa.

Harapan kita, semoga kalau kapal itu bisa aktif kembali masuk di Kendawangan itu, ekonomi masyarakat itu sangat bagus peningkatannya.

Saya pikir itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

Untuk kereta api memang di Kalimantan Barat belum ada kereta, Pak. Mudah-mudahan nanti Bapak jalan-jalan ke Kalimantan Barat barangkali cocok untuk dibangun kereta, Pak.

Terima kasih, Pak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Iya siap

KETUA RAPAT:

Oke silakan.

F-PPP (Dr. H. MUH. ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota, dan Pak Dirjen.

Langsung saja. Ini terkait dengan pelaksanaan pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan yang sampai hari ini masih sampai dari Maros sampai ke Kabupaten Barru, Pak. Saya tadi Mencoba untuk bisa tahun 2024 ini diselesaikan sampai Palanro sesuai dengan nomenklator yang sudah ada. Namun, Makassar sepertinya ini memang agak sulit karena menurut Pak Dirjen bahwa di daerah Makassar ini masih belum ada penlok-nya. *Nah*, terkait dengan dari Parepare sampai ke Kabupaten Barru, saya berharap untuk tahun 2024 ini bisa dilaksanakan. Di sana kan tinggal pilihannya ada pada Pak Dirjen, apakah mau lewat pinggir laut atau ke darat tinggal segera ditentukan sehingga kebebasan lahan ini segera dilakukan untuk bisa menyelesaikan beberapa tahapan hingga tahun 2024.

Yang kedua, pemanfaatan depo yang ada di Maros, saya pikir kurang maksimal sebelum sampai ke Makassar. Oleh karenanya, rencana untuk sampai ke Mandai ini perlu digenjut, Pak Dirjen, sehingga harapan besar kami bahwa ke depan paling minimal dari Bandara Sultan Hasanuddin sampai dengan Palanro Parepare sudah bisa berfungsi sehingga masyarakat dari luar, dari Makassar itu sudah bisa memanfaatkan kereta api sampai ke pusat kota Parepare. Kalau hari ini dari Maros sampai dengan Kabupaten Barru, ini kan tidak ada kepentingan-kepentingan yang mendesak yang mereka harus menggunakan kereta api, kenapa? karena urbanisasi masyarakat itu dari Maros sampai ke Barru ini tidak terjadi karena tidak ada tujuan khusus dari Maros untuk ke Parepare begitupun sebaliknya bahkan ke Pangkep. Oleh karenanya, yang dipergunakan hari ini hanya, yang menggunakan hari ini hanya teman-teman yang ingin mencoba naik kereta api ya.

Sering kita lihat di media-media sosial bahwa mereka naik di Maros turun di Barru, kereta apinya kembali juga ikut juga naik. *Nah*, itu yang terjadi hari ini, jadi hanya sebagai tempat rekreasi saja hiburan sebagai masyarakat karena tidak ada tujuan mereka naik kereta api untuk bekerja, *enggak* ada, *ndak* ada mobilisasi orang untuk dari tempat yang satu untuk tujuan untuk bekerja atau tujuan untuk perpindahan tempat *nggak* ada. Yang ada hanya betul-betul antar kota yang setiap hari ya itu saja berulang-ulang ya. Jadi

prospeknya kurang begitu maksimal kalau hanya selesaikan sampai di situ. Oleh karenanya, kami mohon bisa sesegera mungkin Makassar-Parepare itu menjadi prioritas utama dari Kementerian Perhubungan agar ini betul-betul maksimal fungsinya, Pak.

Yang berikutnya, untuk laut. Kami tentu berulang kali juga sudah menyampaikan Pelabuhan Garongkong di Sulawesi Selatan Kabupaten Barru ini kan mempunyai kedalaman yang cukup dalam kurang lebih 21 meter kedalamannya, ini segera melakukan pembangunan sehingga bisa menjadi alternatif bila terjadi kepadatan yang luar biasa di Kota Parepare maupun di *newport* Makassar. Oleh karenanya, kita mendorong bahwa Garongkong ini menjadi prioritas utama untuk dikembangkan, ya. Apalagi sampai hari ini juga menjadi salah satu pelabuhan yang menghubungkan ke Kalimantan Timur dan berbagai daerah di Sulawesi.

Kemudian juga sama dengan Bulukumba, ya. Kita tahu Bulukumba ini kan punya wisata yang cukup luar biasa Tanjung Bira tentu harus difasilitasi dengan pelabuhan yang memadai sehingga masyarakat di luar daripada Bulukumba ini bisa mengakses ke sana melalui laut atau kapal-kapal yang tentu diharapkan bisa menyandar di Kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kunjungan untuk wisatawan baik mancanegara maupun dalam negeri.

Kemudian di Maccini Baji yang di Pangkep juga sangat memprihatinkan, Pak. Kami pernah ke sana, ini sangat tidak diperhatikan ya. Oleh karenanya, mohon perhatian dari Kementerian Perhubungan untuk lebih paling minimal fasilitas pelabuhannya bisa ditingkatkan, ya. Kalau Parepare *sih* yang merupakan yang paling vital, ya kita harapkan fasilitas-fasilitas yang di-dukungnya terutama untuk keselamatan perairan atau keselamatan laut itu menjadi prioritas di sana karena ini salah satu pelabuhan yang cukup padat dan tentu membutuhkan fasilitas yang cukup memadai yang paling *up to date* sehingga seluruh fungsi bisa berjalan dengan baik.

Begitu barangkali, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Fauzi? Pak Fadholi? Ya.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang saya hormati,

Yang saya hormati Bapak Dirjen baik Dirjen Laut maupun Dirjen Kereta Api,

Ini saya akan menyampaikan beberapa hal saja yang kaitannya dengan Dapil saja, Pak, secara konkrit. Di daerah saya ini, Dirjen Kereta Api, Pak ya. Di wilayah dari mulai Ambarawa itu kan dibangun jalur kereta api ya itu masuk jalur. Sekarang ini sampai sekarang *enggak* ada realisasi, Pak, padahal itu sudah dikerjakan, tanahnya sudah *dikeduki*, masyarakat-masyarakat juga sudah pada pindah kan itu. Relynya saja sampai sekarang belum dibangun itu, Pak, dan realisasinya juga belum. Padahal itu kan diharapkan betul merupakan di samping transportasi darat juga itu kan kaitannya dengan kereta wisata, Pak, itu. Jadi saya kalau boleh nanti pada saat tertentu kami akan undang perwakilan dari Dirjen Perkeretaapian untuk bisa cek langsung di sana, sekarang ditanami jagung oleh masyarakat, Pak, ditanami jagung padahal pasar juga sudah dipindah itu, *nah*, ini.

Dan dulu juga pernah saya sampaikan pada saat rapat di sini, saya, apakah itu juga nanti menjadi salah satu perhatian pada tahun 2024 apa tidak? sebab kalau tidak, itu sayang, Pak, itu kereta sangat luar biasa bagus dan mungkin investasinya juga sudah cukup besar itu, cukup besar, kalau *enggak* ditindaklanjuti sayang. Stasiunnya menggunakan stasiun yang lama itu, Pak, yang ada di Tuntang itu kan bagus sampai Ambarawa kemudian itu menjadi kereta wisata dan sekaligus juga untuk transportasi yang kaitannya itu.

Kemudian yang kedua, juga ada beberapa titik itu apa namanya *stop-an* itu apa namanya itu, Pak? Ya, itu terutama di Kendal, Pak, di wilayah Kendal, nanti kami juga akan tunjukkan beberapa titik itu mungkin perlu diperbaiki gitu ya, dioptimalkan lagi *gitu*, Pak. Sudah ada *sih* cuma mungkin perlu karena lintasan itu lintasan yang cukup ramai. Itu yang kaitannya dengan masalah perbaikan perkeretaapian. Kalau yang lain, saya berikan apresiasi sudah cukup bagus lah, Pak, layanan kereta api di sana juga sudah bagus. Itu hanya saya titik beratnya ada di masalah pembangunan kereta wisata yang ada di wilayah Tuntang itu, Pak, Kecamatan Ambarawa sampai Beringin jadi itu.

Kemudian yang ke Pak Dijen Laut, Pak, ya. Yang pertama, terkait dengan karena di sana wilayah rob Pak yang Kota Semarang itu kan wilayah rob. Kemudian juga pengaturan terhadap kapal-kapal nelayan ini mungkin perlu ada pengaturan itu, Pak. Jadi kapal sandar nelayan itu juga, sekalipun nanti kalau bicara itu juga kaitannya dengan KKP, tetapi kan ini mesti harus ada kerjasama antara KKP dengan Dirjen Kelautan untuk penataan dan itu di beberapa titik, Pak, ada di Weleri, ada di Kendal, ada di Kaliwungu kalau di Dapil saya, kemudian kalau ke sana kan sampai Pantura, itu.

Kemudian yang kedua, ini kelihatannya punya pelabuhan, Pak, di Kendal tetapi sampai sekarang kan tidak optimal itu. Itu, sekarang untuk batubara apakah pernah saya lihat itu, itu mungkin juga perlu diperhatikan agar bagaimana kalau memang itu bisa dioptimalkan lebih bagus dan itu bisa menambah apa namanya PNBK ya, Pak, ya itu jadi bagus, khususnya pelabuhan di Kendal itu punya, Pak, itu miliknya Ditjen Kelautan.

Dan yang berikutnya adalah sudah sekian puluh tahun ya KSOP di Semarang ini kan. Semarang ini kan *sentral* Jawa Tengah ya, Pak, *sentral* Jawa Tengah yang diharapkan nanti juga bisa setidaknya mendekatilah dengan Tanjung Priuk itu yang Tanjung Mas itu. Mungkin itu perlu ada satu terobosan agar mengoptimalkan peran Tanjung Mas ini untuk bisa setidaknya itu bisa ada di bawah sedikitlah dengan Tanjung Priuk kan itu, *tanjung...* ya Tanjung Perak minimal Tanjung Perak lah kan itu. Jadi Tanjung Mas tapi masih dibawah Tanjung Perak.

Termasuk juga kita pernah adakan kunjungan spesifik ke KSOP Semarang itu. KSOP Semarang itu kita pernah ada kunjungan spesifik ya kan, itu kantornya di tengah-tengah dan itu miliknya Pelindo katanya *gitu* dan sangat rawan, rawan kalau itu tanggulnya itu tanggul itu hanya beberapa dan selalu air laut itu di atas darat yang ada di situ, itu sangat berbahaya.

Nah, menurut informasi dan keterangan yang kami terima pada saat kunjungan spesifik itu kan bermaksud mengajukan kantor baru, Pak, kantor baru. Sejauhmana itu kajiannya dan sebagainya ini sampai sejauhmana itu untuk dan sekaligus mengoptimalkan layanan dari KSOP di Jawa Tengah.

Saya pikir itu yang secara spesifik yang saya tahu dan yang pernah kami bersama-sama komisi melakukan kunjungan di sana, di samping mungkin penanganan rob itu kerja samanya dengan BWS dan sebagainya mungkin bagaimana. Karena di wilayah kantor KSOP itu dan juga di wilayah Pelni dan juga Pelindo itu dan masyarakat di sana terutama yang di ujung laut ini memang ketika rob datang itu, tidak bisa terhindarkan lagi. Mungkin ada solusi apa dan program apa yang akan dilakukan di sana itu. Saya pikir menjadi bagian yang sangat penting untuk bisa dipikirkan *entah* bagaimana dan apa programnya, nanti silakan dari Pak Dirjen.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Hamka, terakhir ya, Pak Hamka.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Terima kasih, Pimpinan.

Mohon maaf terlambat, *memberesin* juga anggaran di sana, Pak Ketua.

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Ditjen Hubla dan Kereta Api,**

Saya hanya ke Pak Dirjen Laut. Yang pertama, saya ingin konfirmasi dulu Pak mengenai rencana rehabilitasi Pelabuhan Taka Bonerate, Pelabuhan Bonerate yang kemarin sudah didiskusikan dan bahkan sudah akan dianggarkan pada tahun 2023. Cuma masalah teknis kemarin sehingga tidak jadi dianggarkan hanya 2 miliar kalau saya tidak salah tetapi menurut Dirjen yang lalu menyampaikan bahwa akan ada anggaran 32 triliun eh 32 miliar, *sorry* karena bicara triliun tadi di Banggar, Pak, 32 miliar ya. Terus ini yang saya pertanyakan, apakah lanjut tahun ini karena itu *multiyears*? Itu yang pertama, Pak Dirjen.

Yang kedua, saya waktu kunjungan kerja yang lalu masa reses, saya ke perbatasan yang terjadi bencana ini ke Pulau Selayar di mana di sana memang akibat gempa, itu harus dilakukan karena perbaikan itu penting sekali karena kerusakannya berat, Pak Dirjen. Kan saya kira jajaran Pak Dirjen itu sudah tahu persis sampai sejauhmana beratnya kerusakan itu. Oleh karena itu, saya berharap ada penjelasan, apakah itu tahun ini sudah dilakukan langkah-langkah untuk menganggarkan dan melakukan eksekusi terhadap pemeliharaan dan perbaikan Bonerate itu, Pak?

Kemudian yang selanjutnya, saya juga dari Kepulauan Selayar ini mungkin ada apa tidak anggarannya, mungkin agak belum ya, terkait dengan kapal, Pak, kapal patroli. Saya coba naik dan pinjam dari Syahbandar, itu tidak bisa berjalan jauh sampai di perbatasan yang ada di Selayar di sana terpaksa kami kembali, Pak, karena memang sudah tua kapalnya, ya di navigasi yang bagus tetapi di Syahbandar ini kecil sekali. Oleh karena itu, mohon barangkali untuk ke depan karena itu luas areanya juga cukup, cukup luas makanya saya berharap kalau memungkinkan anggarannya supaya pengadaan kapal itu bisa dilakukan karena saya lihat juga dalam program Bapak ada pengadaan kapal kalau saya tidak salah.

Saya kira itu saja, Pimpinan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan buat Pak Dirjen untuk mengeksekusi hal-hal tersebut.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumussalam.

Baik, dari anggota selesai.

Saya ke meja Pimpinan, Pak Iqbal, silakan.

F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E, M.Com) – WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI:

Iya, terima kasih, Pak Robert.

**Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Komisi V,
Yang saya hormati Pak Plt. Dirjen Perhubungan Laut dan Pak Dirjen Perkeretaapian,**

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ini terkait dengan Ditjen Perhubungan Laut ini, Pak Dirjen. Kalau kita melihat anggaran untuk tahun 2024 sebesar 9,49 triliun, di sini ada kenaikan 70 miliar, Pak, ya dari tahun 2023 sebesar 8,79. Tentu kita sama-sama bersyukur atas kenaikan ini. Mudah-mudahan nanti sebelum *final* bisa bertambah lagi kenaikannya karena kita tahu sama-sama tahu bahwa memang yang namanya apa sarana dan prasarana di pelabuhan itu sangat diperlukan, Pak, bagi negara kita. Negara kita negara maritim hampir di semua provinsi mempunyai pelabuhan dan tentu pelabuhan ini kita harapkan bisa apa menjadi pusat transportasi baik itu transportasi barang dan manusia penumpang.

Nah, salah satunya, Pak, adalah tentang sarana dan prasarana di Pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Teluk Bayur itu kan merupakan salah satu pelabuhan yang mempunyai nilai sejarah yang sudah berdiri dari zaman kolonial Belanda dan salah satu pelabuhan yang terbesar di Pulau Sumatera. Mungkin selama ini dari Kementerian Perhubungan sudah banyak membantu, saya berharap sekali ke depannya akan lebih banyak lagi bantuan di untuk sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan Teluk Bayur. Saya kira itu, Pak Dirjen Perhubungan Laut.

Yang kedua, ini Pak Dirjen Perkeretaapian. Memang kalau bicara Sumatera Barat, kereta api ini tidak mendominasi ya, di sana itu yang mendominasi adalah angkutan moda darat dan tadi pelabuhan tadi. Tapi walaupun demikian saya berharap Sumatera Barat menjadi salah satu menjadi perhatian dari Pak Dirjen untuk membangun lebih baik lagi sarana dan prasarana perkeretaapian yang ada di Sumatera Barat.

Saya kira itu saja, Pak Robert.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih, Pak Iqbal.

Saya ada beberapa catatan saja yang saya sampaikan kepada Pak Dirjen Kereta Api dan Kelautan.

Yang pertama, Dirjen Kereta Api. Melihat anggaran 2023 dan 2024 itu ada kenaikan sekitar 2,7 ya 2,4 ya 2,42 triliun ya. Jadi harapan kami dengan kenaikan ini, itu bisa mengatasi hal-hal yang masih menjadi masalah di Perkeretaapian. Yang pertama tentang tadi sempat disampaikan juga ada yang disampaikan bahwa pelintasan kereta itu menjadi daerah yang sangat berbahaya, mesin pembunuh di situ, Pak, masih banyak juga korban jiwa yang terjadi di daerah-daerah itu dan ini yang perlu menjadi menurut saya perhatian serius oleh kereta api. Karena dengan anggaran besar ini berapa persen bisa mengatasi korban yang selama ini kita tahu ya akibat dari perlintasan kereta api yang belum mendapat perhatian yang serius menurut saya maka mohon Dirjen Kereta Api untuk bisa melihat itu.

Kita sepakat untuk mendukung IKN tapi IKN itu belum berjalan, Pak, masih panjang pembangunan persiapan itu dan saya kira perlu waktu yang panjang untuk itu dan kita memerlukan perhatian yang serius untuk dalam waktu dekat ini untuk melihat masalah-masalah yang ada dulu kita selesaikan ya maka itu tadi saya sampaikan bahwa tolong perhatikan ini yang masih ada kendala masalah yang besar terhadap perlintasan-perlintasan kereta api yang ada sekarang itu menjadi konsen menurut saya agar ke depan tidak ada lagi korban jiwa berjatuhan di perlintasan kereta, ya.

Yang berikut tentang KRL yang kemarin sudah jalan. Saya sempat diwawancarai, saya sampaikan bahwa ya perlu untuk teman-teman Ditjen Kereta Api dan KA, KIA untuk bisa lebih menjamin terhadap keselamatannya nanti kedepan ya. Menurut saya harus ada masa uji coba itu berapa lama, Pak, ya agar yakin benar bahwa itu nyaman. Karena kita tahu bahwa itu menggunakan teknologi tanpa pengemudi ya kan, ini bisa menjamin apa tidak ya kan. Dan itu uji coba kemarin beberapa hal yang sudah terjadi ya kita harapkan ini tidak boleh, sudah diresmikan, itu hal-hal itu tidak boleh terjadi seharusnya seperti itu. Tapi kalau hal itu masih terjadi, *nah*, ini buat kami menjadi tanda tanya semuanya, Pak. Jadi mohon jadi perhatian itu ya dan saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, jadi dan, ya.

Sebelum saya berikan kesempatan untuk Pak Dirjen, Ibu Sadarestuwati, saya beri kesempatan untuk menyampaikan.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

**Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati serta mitra Komisi V hadir di sini,
Pak Dirjen Perhubungan Laut beserta jajaran dan Pak Dirjen Perkeretaapian beserta jajaran,**

Saya pertama ke Pak Dirjen Perkeretaapian. Mohon maaf karena saya hadirnya ini terlambat. Pak Dirjen, ini saya membaca ini saya baca yang di depan saja. Belanja barang non operasional 2,765 yang di sini ini ada mendukung IKN 10,10 miliar. Ini untuk apa ya kereta api di IKN ini ya?

Kemudian juga berkaitan dengan pemberian subsidi. Subsidi Perintis Perkeretaapian dan motis dua ratus koma tujuh puluh miliar. Bapak, saya dijelaskan sedikit ya berkaitan subsidi ini supaya saya ini *enggak dedel-dedel banget*. Nanti kalau ditanya ini kereta kan ada subsidinya tapi *kok, kok* itu kan *enggak* enak. *Nah*, kalau saya tahu jawabannya, saya menyampaikannya lebih enak.

Nah, terus perkembangan kereta api yang di Sulawesi itu sudah sejauhmana? apakah sudah beroperasi atau bagaimana? Nanti saya juga sedikit bisa diberikan gambaran.

Kemudian untuk Perhubungan Laut. Perhubungan Laut, Bapak, ini juga kan ada apa namanya subsidi untuk jalur laut jalur perintis ya dan apalagi ya cukup besar karena tiap tahun ini ada untuk pengalokasian subsidi. Kemarin saya sampaikan juga berkaitan jalur apa yang... yang di Padang yang beberapa waktu lalu saya sampaikan pada saat Raker. Apakah itu juga masuk jalur perintis karena saya *enggak* punya laut, jadi saya tanya ini. Kebetulan ini ada yang menanyakan yang nama kapal Gambolo dan Ambu-Ambu, ini yang minta bisa penambahan apa, iya waktu pelayarannya ini minta ditambah karena kan ini alasannya hasil ladang masyarakat itu tidak bisa terangkut sehingga menumpuk di pelabuhan dan di dermaga dan itu akhirnya busuk. *Nah*, ini tolong ini saya dijelaskan apakah ini juga masuk di apa jalur yang tadi mendapatkan subsidi.

Kemudian yang rute yang jalur yang dapat subsidi untuk kapal ternak, itu yang daerah mana saja? Kemudian sistemnya seperti apa? karena selama kami di Komisi V ini hampir tidak pernah kita mempertanyakan bagaimana cara pembayaran subsidi ini. Apakah berdasarkan berapa muatannya ataukah seperti apa kami kan *enggak* ngerti, yang pasti anggaran untuk subsidi ini

cukup besar. Tentunya kami mempunyai tugas pengawasan ini jangan sampai apa kami tidak tahu apa-apa, tentunya seperti itu ya.

Dan di Madura juga itu ada waktu kami kunjungan itu ada pelabuhan ternak yang pada waktu itu kami kunjungan jalannya masih sangat sempit. Menurut kami itu perlu dilakukan pelebaran karena tidak mungkin kalau seperti itu begitu juga dermaganya. Katanya dulu ada pembangunan apa pelebaran atau apalah, pernah kami di situ yang sudah ada yang di dekat di daerah mana ya itu ikut Bangkalan apa ikut Sampang ya pokoknya di situ *deh*. *Nah*, apakah itu juga sudah ditangani sudah ada pembangunan di situ karena biasanya sapinya kan kemudian turun ke laut, Pak, berenang. Jadi saya punya cerita ini, saya dulu juga boleh dibilang pernah kerja sapi, pernah impor sapi yang yang ya cukup banyak lah, dulu pada waktu masih jadi pengusaha dulu ya paling tidak masih 1.000, 2.000 *gitu* ya. *Nah*, ini dulu kalau diangkut kan ini nunggu dulu nih, Pak, di sebelum masuk Perak *nih*, sehari-hari paling tidak 4 hari mereka menunggu sampai gantian kapal masuk karena saya biasa ngawal di situ. *Nah*, ini pun kalau menurunkan itu tidak bisa langsung sehingga sapi saya sering, Pak, jatuh ke laut di Tanjung Perak itu. Itu sering sekali seperti itu, apakah ini juga masih seperti itu? karena ini kan harus kita pikirkan.

Pak Presiden membuat tol laut, Pak Presiden menginginkan jalur ini menjadi benar, kemudian tentunya para peternak para petani tidak mengalami kerugian kan seperti itu. *Nah*, tentunya kami berharap pelabuhan-pelabuhan yang masih belum sempurna mumpung masih ada waktu segera disempurnakan ya. Jadi tidak melulu membangun baru tetapi apa yang sudah ada disempurnakan. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pimpinan dan saya menunggu kapan Pak Dirjen Kereta Api mengajak saya jalan-jalan melewati *double track* yang dulu pernah saya perjuangkan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Semua sudah selesai ya.

Pak Dirjen, saya kira ini kita bahas anggaran jadi kita fokus saja dulu. Nanti pengawasan Bapak jawab secara tertulis *enggak* apa-apa tapi kita masuk kita fokus saja anggaran. Jadi saya minta *statement* saja dari Pak Dirjen Kereta Api sesuai apa yang telah kita bicarakan tentang anggaran, habis itu Pak Dirjen Plt. Laut.

Silakan Pak Dirjen Kereta Api.

**DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM):**

Baik

**Pimpinan yang kami hormati,
Bapak-Ibu sekalian Anggota Dewan yang kami hormati,**

Ada beberapa hal masukan-masukan untuk Ditjen Perkeretaapian terkait dengan penganggaran dan kegiatan. Pertama secara umum kami laporkan bahwa terkait dengan apa yang menjadi masukan Bapak-Ibu sekalian terkait dengan penanganan pelintasan bidang penganggarnya sebagaimana kami paparkan kemarin, Pak, semua bidang sudah kami usulkan untuk bagaimana penanganan perlintasan di daerah sudah kami anggarkan. Dan untuk pelintasan daerah memang masing-masing berperan pusat, provinsi, maupun daerah, Pak. Jadi itu sudah kami anggarkan untuk mengantisipasi masalah penanganan kecelakaan di pelintasan sebidang.

Yang kedua terkait dengan penganggaran kami yang naik tadi. Memang terutama yang IKN anggaran untuk IKN itu memang kami siapkan untuk studi, Pak, karena kereta api itu baru hadir di IKN itu di tahun 2029 dan mulai pembangunan di tahun 2025. Dan kami siapkan studi untuk persiapan untuk lelang-lelang baik itu KPBU maupun nanti buat anggaran untuk di IKN.

Selanjutnya, untuk di Sulawesi Selatan Bapak-Ibu sekalian, tadi juga ada beberapa Anggota Dewan menanyakan. Pertama, memang di tahun 2023 ini kami fokus menyelesaikan dari Mandai sampai ke Barru-Garongkong belum sampai ke arah Parepare, Pak. Jadi kita fokusnya menyelesaikan sampai di Garongkong termasuk akses-aksesnya. Selanjutnya, untuk kereta api yang sudah beroperasi yang itu sudah dua KA Perintis yang beroperasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan nantinya akan menjadi salah satu percontohan kami dalam operasional angkutan barang dengan model di mana kita akan menaikkan truk di atas kereta api yang nantinya akan menjadi salah satu model penanganan ODOL maupun kemacetan lalu lintas di jalan raya yang ada di Jawa.

Selanjutnya, untuk terkait dengan depo, Pak. Iya Pak nanti yang di Sulawesi juga sudah kami tingkatkan terhadap posisi tersebut. *Nah*, masalah tarif, Pak, tarif memang kayaknya *nggak* ada yang naik 200.000, Pak, nanti kami koreksi ya, Pak. Yang ada mungkin KA Argo Pariangan menjadi 200.000 tiketnya, Pak, jadi bukan naik 200.000. Yang kedua, nanti terhadap desain pintu juga memang didesain untuk posisi tinggi 170 meter, 170 meter di Indonesia, Pak, yang 180 perlu nunduk sedikit untuk naik tapi di dalamnya mereka tetap bisa berdiri.

Selanjutnya, beberapa masukkan lagi, Pak. Dari Pak Sumail juga nanti kami coba kaji kembali terhadap kemungkinannya dioperasikannya KA Wisata di wilayah Banyuwangi maupun di Bondowoso.

Itu Pak, selebihnya nanti kami masukkan di dalam kaji kembali untuk usulan-usulan baru di dalam kegiatan 2024.

Terima kasih, Pak Pimpinan. Silakan Pak.

KETUA RAPAT:

Baik.

Lanjut Pak Plt. Dirjen Perhubungan Laut.

**Plt. DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIBADI, M.Sc.):**

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Tentunya mendengar masukan dari Anggota Komisi V, kami mencatat ada beberapa hal yang terkait dengan pelabuhan kemudian juga dengan angkutan perintis termasuk angkutan ternak. Pada intinya, kami akan melakukan penyesuaian kembali terhadap masukan-masukan yang memang belum masuk di tahun 2024. Dan memang tadi yang tadi sampaikan beberapa sudah masuk di anggaran 2024.

Terima kasih, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Kita setelah mendengar masukan dari Anggota dan tanggapan Dirjen, kita lanjut ke kesimpulan ya. Tayangin kesimpulannya.

Baik, saya bacakan kesimpulannya ya.

**DRAF KESIMPULAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DAN DIRJEN
PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
SELASA, 5 SEPTEMBER 2023.**

Komisi V DPR RI memahami penjelasan, ini Plt ya? Organisasi ya? jadi betul ya tidak pakai Plt. ya. Oke, baik jadi saya ulang.

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. Unit Eselon I Ditjen Perhubungan Laut Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 sebesar 14.775.940.197.000. Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar 9.499.464.798.000. Selisih 5.276.475.399.000.
 - b. Ditjen Perkeretaapian Pagu Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 15.039.689.316.000. Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.689.137.480.000,00. Selisih 5.350.551.836.000.
2. Komisi V DPR RI meminta Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan masing-masing unit organisasi Eselon I pada Tahun Anggaran 2004 sesuai dengan saran, pendapat, serta usulan Komisi V DPR RI dalam rangkaian rapat pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota? setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Pemerintah?

PEMERINTAH:

Setuju, Pak, setuju.

KETUA RAPAT:

Oke.

(RAPAT: SETUJU)

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Ketua, sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan ke Pak Dirjen dan seluruh jajaran bahwa kesimpulan ini adalah mengikat untuk kita semuanya untuk ditindaklanjuti. Maksud saya adalah kemitraan ini tentu kita harus jaga dengan baik karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tentang MD3

Pasal 80, Anggota mempunyai hak untuk mengajukan kegiatan-kegiatan daerah pemilihannya, itu Pasal 80, Pak. Bunyi poin 2 ini benar-benar mengikat untuk kita bisa mensinkronkan kalau ada ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi segera diinformasikan untuk dipenuhi ya. Itu saja yang menjadi catatan saya, Pak Ketua, bahwa poin 2 dan atukah kesimpulan pada hari ini mengikat untuk kita tindaklanjuti.

Saya kira demikian.

Terima kasih. Saya hanya mengingatkan untuk kita semuanya agar supaya terjadi sinkronisasi yang baik. Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.):

Sedikit.

Saya setuju tadi sudah kesimpulannya akan tetapi tadi pertanyaan saya kan belum dijawab, saya mohon kiranya nanti jawaban itu bisa tertulis disampaikan ke saya sehingga saya bisa menjelaskan kalau ada pertanyaan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, terima kasih Bu Estu, tadi memang saya minta untuk nanti dibuat tertulis karena ini kita fokus di anggaran.

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya?

F-P. NASDEM (Drs. FADHOLI, M.Ikom):

Di sini, Pimpinan. Jadi kalau saya tidak perlu dijawab tapi itu dilaksanakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Keputusan yang kami lakukan di sini itu semua mengikat, Pak, ya, ini rapat resmi, Pak. Jadi kesimpulan itu mengikat kita semua untuk taat.

Baik.

Saudara-Saudara yang kami hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut maka rangkaian acara RDP pada hari ini telah kita selesaikan.

Kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.

Sebelum rangkaian acara rapat hari ini saya tutup, kami berikan kesempatan kepada salah satu Dirjen Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan sambutan penutup.

Silakan, Pak Dirjen Kereta Api.

**DIRJEN PERKERETAAPIAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
(Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM., IPM):**

Baik

**Pimpinan yang kami hormati,
Bapak-Ibu dan Anggota Komisi V yang kami hormati,**

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas masukan dan saran pada RDP hari ini.

Selanjutnya saya nanti bersama dengan Direktorat Jendereal Perhubungan Laut akan menindaklanjuti saran masukan Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR yang terhormat yang telah disampaikan kepada kami untuk kami tindaklanjuti dengan melakukan penajaman secara sinkronisasi terhadap usulan dimaksud.

Di forum ini, kami juga mengharapkan dukungan penuh segenap Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat agar kami dapat terus bekerja keras mencapai tujuan yang sama untuk mewujudkan penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2024 bidang perhubungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, serta bermanfaat sepenuhnya bagi masyarakat.

Terima kasih, Bapak
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.

Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan maka rapat dengar pendapat pada hari ini dapat kita tutup dengan ucapan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.25 WIB)

JAKARTA, 5 September 2023
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002